

Pengukuran Kinerja Pengelolaan Zakat Nasional menggunakan Indeks Zakat Nasional (IZN) 2.0 dan Dampaknya terhadap Pengentasan Kemiskinan di Indonesia Periode 2021

Rini Elvira

Universitas Sjech M. Djamil Djambek Bukittinggi

Email : rinielvira@iainbukittinggi.ac.id / rinielvira99@gmail.com

Abstract: *The study aims to measure the performance of national zakat management and its impact on poverty alleviation in Indonesia for the 2021 period. National Zakat Index (N.Z.I.) 2.0, formed based on macro and micro dimensions, is used to measure the performance of national zakat management. The General Poverty Index (GPI), with headcount index, income gap ratio, poverty gap, sen index, and F.G.T. index, and the B.A.Z.N.A.S. Welfare Index (B.W.I.), with indicators of the poverty line, had kifayah. Nisab zakat is used to measure the impact of zakat management on poverty alleviation in Indonesia for the 2021 period. The result show (1) The performance of the national zakat management for the 2021 period is considered very good, with an N.Z.I. value of 0,88. (2) Based on the GPI and B.W.I. indicators, the management of national zakat in the distribution sector has been able to improve the welfare of mustahik and alleviate poverty in Indonesia for the 2021 period*

Keywords: *Performance of national zakat management, NZI, Poverty alleviation*

Abstrak : Tujuan penelitian adalah untuk mengukur kinerja pengelolaan zakat nasional serta melihat dampaknya terhadap pengentasan kemiskinan di Indonesia periode 2021. Indeks zakat nasional (IZN) 2.0. yang dibentuk berdasarkan dimensi makro dan mikro digunakan untuk mengukur kinerja pengelolaan zakat nasional, serta Indeks Kemiskinan Umum (IKU) dengan indikator headcount index, income gap ratio, poverty gap, sen index, dan index FGT, serta Indeks Kesejahteraan BAZNAS (IKB) dengan indikator garis kemiskinan, had kifayah, dan nisab zakat digunakan untuk mengukur dampak pengelolaan zakat terhadap pengentasan kemiskinan di Indonesia periode 2021. Hasil penelitian menunjukkan 1) kinerja pengelolaan zakat nasional untuk periode 2021 dinilai sangat baik dengan nilai IZN sebesar 0,88. 2) Berdasarkan indikator IKU dan IKB dapat dikatakan bahwa pengelolaan zakat nasional dibidang penyaluran telah dapat meningkatkan kesejahteraan mustahik dan mengentaskan kemiskinan di Indonesia periode 2021.

Kata Kunci: Kinerja pengelolaan zakat nasional, IZN, Pengentasan Kemiskinan

Copyright (c) 2022 Rini Elvira

A. Pendahuluan

Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 bertujuan dan bercita-cita untuk melindungi seluruh masyarakat Indonesia dan tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa dan ikut melaksanakan ketertiban dunia berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial. Tujuan dan cita-cita bernegara ini diwujudkan oleh pemerintah dalam pembangunan nasional yang merupakan rangkaian upaya pembangunan berkelanjutan meliputi seluruh aspek kehidupan masyarakat, bangsa dan negara guna meningkatkan tingkat kesejahteraan masyarakat dari generasi ke generasi ^{1 2}

Rencana Pembangunan Jangka Panjang 2005-2025 menyebutkan bahwa salah satu arah pembangunan nasional adalah pembangunan sumber daya manusia atau

¹ Undang-Undang RI, ‘Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2007 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005 -2025’, 2007, h. 1–13.

² Fahimah Diah Anisa Suryo Sakti Hadiwijoyo, *Perencanaan Pembangunan Daerah*, (Jakarta: PT. Rajagrafindo, 2020). h. 25

pembangunan sosial³⁴. Salah satu fokus perhatian pemerintah dalam pembangunan sosial adalah memerangi sumber kemiskinan dan mengeluarkan masyarakat dari kemiskinan⁵

Gambar 1. Profil kemiskinan di Indonesia



Sumber : Bappenas

Dari gambar terlihat semenjak tahun 2012 hingga September 2019 tren tingkat kemiskinan nasional menunjukkan kondisi yang membaik karena mengalami penurunan dengan persentase tingkat kemiskinan terendah berada pada september 2019 sebesar 9,22%. Namun pada tahun 2020 tingkat kemiskinan mengalami peningkatan menjadi 10,19% dikarenakan faktor terjadinya pandemi covid19. Pada akhir september 2021 kembali tingkat kemiskinan sedikit membaik karena mengalami penurunan menjadi 9,71%. Namun bila dibandingkan masa kondisi sebelum terjadinya covid19 tingkat kemiskinan masih tidak baik, dan hal ini perlu untuk menjadi perhatian.

Kemiskinan harus diatasi. Jika tidak, akan menimbulkan berbagai persoalan baik secara material maupun secara spritual. Beberapa hasil penelitian sudah membuktikan bahwa kemiskinan dapat menyebabkan rendahnya tingkat pendidikan masyarakat di Indonesia^{6, 7, 8}. Kemiskinan memperburuk akses sanitasi dan air bersih di Indonesia⁹. Kemiskinan memperburuk kesehatan masyarakat di Kabupaten/Kota Provinsi Bali dan Kabupaten Malang^{10,11}, kemiskinan menimbulkan keterbatasan spritual seperti

³ Bappenas, *Visi Dan Arah Pembangunan Jangka Panjang (PJP) TAHUN 2005 – 2025*, 2005.pp.8

⁴ Suryo Sakti Hadiwijoyo. h. 153

⁵ Pemerintah Provinsi Sumatera Barat, *Rencana Strategis (RENSTRA) 2021-2026*, Badan Perencanaan Pembangunan Nasional, 2021.

⁶ Bagus Adhitya, Agus Prabawa, and Heris Kencana, 'Analisis Pengaruh Pendidikan , Kesehatan , Sanitasi Dan Rata-Rata Jumlah Anggota Keluarga Per Rumah Tangga Terhadap Kemiskinan Di Indonesia', 6.1 (2022), 288–95 <<https://doi.org/10.33087/ekonomis.v6i1.501>>.

⁷ Enia elga pratiwi, 'Analisis Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi, Tingkat Pendidikan Dan Kesehatan Terhadap Jumlah Penduduk Miskin Di Bali Tahun 2011-2020', 6.1 (2022), 112–22.

⁸ Rachvianti Putri Anggraeni and others, 'Pengentasan Angka Kemiskinan Di Indonesia Tahun 2015-2019', 2.4 (2022), 1–12.

⁹ Adhitya, Prabawa, and Kencana. h. 288

¹⁰ Enia elga pratiwi. h. 25

¹¹ Siti Nur Azizah and others, 'Implementasi Zakat sebagai Islamic Social Security Menurut Pandangan Muhammad Nejatullah Siddiqi', 07.01 (2022). h. 80

emosi, psikologi, dan rohani¹², memperlemah iman yang dapat mendorong masyarakat untuk melakukan tindakan yang dilarang agama seperti keluar dari agama, melakukan tindak kejahatan demi memenuhi tuntutan atas kebutuhan dasar¹³. Mengutip pendapat Irwansyah (2021) seorang pakar kesehatan jiwa, kemiskinan dan himpitan ekonomi dapat menjadi penyebab terjadinya depresi yang berakhir pada bunuh diri. Dibuktikan hasil penelitian¹⁴ menemukan kemiskinan dan kesulitan keluarga yang terus menerus berdampak terhadap memburuknya kesehatan mental keluarga terutama anak-anak remaja, serta adanya peningkatan risiko masalah perilaku sosioemosional.

Pengentasan kemiskinan harus dilakukan secara sinergis dan sistematis supaya semua masyarakat dapat merasakan kehidupan yang layak dan bermartabat^{15,16}. Salah satu instrumen pengentasan kemiskinan yang dinilai efektif dalam memperbaiki kehidupan material dan spritual masyarakat miskin sehingga dapat hidup lebih layak dan bermartabat adalah zakat. Zakat berpengaruh positif terhadap pengurangan kemiskinan¹⁷. Bukti sejarah menunjukkan zakat menjadi salah satu instrumen pembangunan sosial yang sangat penting bagi suatu negara, terutama dalam perannya untuk mengurangi konsentrasi kekayaan, menyalurkan harta masyarakat kaya untuk masyarakat miskin^{18,19}. Zakat menjadi salah satu solusi efektif bagi pengentasan kemiskinan melalui optimalisasi pengelolaan zakat secara produktif^{20,21,22,23}. Zakat menjadi alternatif sumber bagi pelaksanaan jaminan sosial di Indonesia yang diimplementasikan dalam bentuk kebijakan yang dilaksanakan oleh lembaga pengelola zakat²⁴.

Zakat merupakan rukun Islam yang ketiga sekaligus sebagai instrumen wajib bagi kaum muslim di dalam proses penghambaan dan pengabdian kepada Allah Swt yang memberikan aplikasi di ranah sosial dan ekonomi kemasyarakatan. Secara formal, zakat menjadi salah satu pilar penting dalam rencana strategis pembangunan ekonomi

¹² Parthiban S Gopal and others, 'Kemiskinan Adalah Satu Fenomena Multidimensi : Suatu Pemerhatian Awal Abstrak Poverty Is a Multidimensional Phenomenon : A Preliminary Observation Abstract Pengenalan', 6.1 (2021), 40–51.

¹³ Laili Dwi Arsyianti Irfan Syauqi Beik, *Ekonomi Pembangunan Syariah*, Edisi Revisi (Jakarta: PT. Rajagrafindo, 2016). h.75

¹⁴ Viviane S Straatmann and others, 'Articles Impact of Poverty and Family Adversity on Adolescent Health : A Multi-Trajectory Analysis Using the UK Millennium Cohort Study', 13 (2022) <<https://doi.org/10.1016/j.janep.2021.100279>>.

¹⁵ Kementerian Komunikasi and D A N Informatika, *Program Penanggulangan Kemiskinan*, 2011. h.17

¹⁶ Nurul Huda, *Ekonomi Pembangunan Islam*, Edisi Pertama (Jakarta: Kecana Prenada Media Group, 2015). h.136

¹⁷ Ratih Wiliasih Nurul Huda, Handi Risza Idris, Mustafa Edwin Nasution, *Ekonomi Makro Islam* (Jakarta: Kecana Prenada Media Group, 2015). h.64

¹⁸ Umer.M.Chapra, *Islam and the Economic Challenge* (Riyadh: The Islamic Foundation dan The International Institute of Islamic Thought, 1992). h.270

¹⁹ Departemen Ekonomi dan Keuangan Syariah - Bank Indonesia and P3EI Fakultas Ekonomi - Universitas Islam Indonesia, *Pengelolaan Zakat Yang Efektif : Konsep Dan Praktik Di Berbagai Negara*, Edisi Pert (Jakarta: Departemen Ekonomi dan Keuangan Syariah - Bank Indonesia, 2016). h.31

²⁰ Yusuf Qardhawi, 'Kiat Islam Mengentaskan Kemiskinan', (Jakarta: Gema Insani Press, 1995).1-188

²¹ M. Nur Rianto Al-Arif, *Teori Makroekonomi Islam: Konsep, Teori, Dan Analisis*, satu (Bandung: alfabeta, 2010). h.247

²² Nurul Huda, Handi Risza Idris, Mustafa Edwin Nasution. pp.72

²³ Rahmad Hakim, *Manajemen Zakat:Histori, Konsepsi, Implementasi*, (jakarta: Kecana Prenada Media Group, 2020). h.123

²⁴ Azizah and others. h. 56

Islam di Indonesia terutama pada pembangunan sosial. Zakat dapat menjadi salah satu sumber daya dan sumber dana potensial bagi masyarakat miskin yang didalam pelaksanaan programnya diharapkan dapat memberikan perubahan positif bagi mustahik khususnya dalam pengentasan kemiskinan²⁵ Dalam rangka meningkatkan daya guna dan hasil guna, zakat harus dikelola sistematis, profesional dan terorganisir oleh petugas (*amil*) zakat secara kelembagaan sesuai dengan ajaran Islam^{26, 27, 28}. Pengelolaan zakat yang efektif dan efisien akan dapat menumbuhkan manfaat zakat dalam mewujudkan kehidupan masyarakat muslim yang layak dan bermartabat dan pengentasan kemiskinan^{29,30}

Di Indonesia, pengelolaan zakat secara resmi diserahkan kepada Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) sebagai lembaga negara nonstruktural bersifat independen dan berkewajiban untuk mempertanggungjawabkan kegiatan kepada Presiden melalui Menteri³¹. BAZNAS menyelenggarakan fungsi pengelolaan zakat yang terdiri atas 1) perencanaan pengumpulan, pendistribusian, dan pendayagunaan zakat; 2) pelaksanaan pengumpulan, pendistribusian, dan pendayagunaan zakat; 3) pengendalian pengumpulan, pendistribusian, dan pendayagunaan zakat; dan 4) pelaporan dan pertanggungjawaban pelaksanaan pengelolaan zakat. Pengelolaan zakat nasional oleh BAZNAS diharapkan mampu menghasilkan kinerja yang baik sehingga mampu mewujudkan kesejahteraan masyarakat muslim dan mengentaskan kemiskinan di Indonesia.

Kinerja pengelolaan zakat nasional diukur menggunakan indikator Indeks Zakat Nasional (IZN) 2.0 yang juga dapat mengukur sejauh mana dampaknya terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat, dan pengentasan kemiskinan baik ditingkat nasional maupun daerah^{32, 33}. IZN 2.0 dibentuk dari 2 dimensi yaitu dimensi makro dan dimensi mikro. Dimensi makro menggambarkan peran dan kontribusi pemerintah serta masyarakat dalam pembangunan lembaga pengelola zakat dengan 3 parameter yaitu regulasi, dukungan anggaran pemerintah, database lembaga zakat yang terdiri atas jumlah lembaga zakat resmi, muzaki individu dan badan usaha. Sedangkan dimensi mikro menggambarkan perspektif kelembagaan zakat dan mustahik dengan indikator performa lembaga zakat yang diukur dari aspek pengumpulan, pengelolaan, penyaluran, serta pelaporan dan pertanggungjawaban zakat, dan dampak zakat secara ekonomi, spritual, pendidikan, kesehatan, dan kemandirian³⁴.

Menggunakan alat ukur IZN 2.0 penelitian ini bertujuan untuk 1) mengukur kinerja pengelolaan zakat nasional, dan 2) mengukur dampaknya terhadap keberhasilan pengentasan kemiskinan di Indonesia selama periode 2021. Diharapkan nantinya penelitian ini dapat memberikan manfaat bagi pihak terkait seperti; 1) akademisi, yaitu

²⁵ Pusat Kajian Strategis BAZNAS, *Indeks Zakat Nasional Dan Kaji Dampak Zakat 34 Provinsi 2021, Jilid 1, Puskabaznas* (Jakarta: Puskas BAZNAS, 2022).

²⁶ Al-Arif. h.248

²⁷ Undang-Undang RI, 'Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat', 2011.

²⁸ Adanan Murrah Nasution, 'Pengelolaan Zakat Di Indonesia', 1 (2020), 293–305.

²⁹ RI, 'Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat'.

³⁰ Pusat Kajian Strategis BAZNAS. h. 55

³¹ RI, 'Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat'. h.

³² Strategis. h. 65

³³ Pusat Kajian Strategis BAZNAS. h. 45

³⁴ Pusat Kajian Strategis BAZNAS. h. 46

sebagai referensi bagi riset lanjutan, dan peningkatan kualitas ilmu pengetahuan di bidang pengelolaan zakat dan pengentasan kemiskinan. 2) Praktisi, yaitu dapat memberikan informasi penting terkait pengelolaan zakat nasional dan pengentasan kemiskinan di Indonesia.

B. Metode Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian studi kepustakaan menggunakan pendekatan kualitatif menggunakan data sekunder dalam bentuk dokumentasi yang dihasilkan dari website <https://www.bps.go.id/>, dan <https://puskasbaznas.com/> serta dari sumber referensi sekunder lainnya. Variabel penelitian berkaitan dengan pengukuran kinerja pengelolaan zakat nasional dan pengentasan kemiskinan. Pengukuran kinerja pengelolaan zakat nasional didefinisikan sebagai pengukuran yang dilakukan terhadap keberhasilan pengelolaan zakat nasional dengan indikator Indeks Zakat Nasional (IZN) 2.0³⁵. Sedangkan pengentasan kemiskinan diartikan sebagai suatu upaya untuk mengangkat masyarakat agar keluar dari kemiskinan, keluar dari kondisi ketidakmampuan memenuhi kebutuhan dasar makanan dan nonmakanan minimum yang diperlukan sehingga dapat hidup layak dan bermartabat^{36, 37, 38}. Teknik analisis data menggunakan pengukuran Indeks Zakat Nasional (IZN) 2.0 yang dapat menjelaskan kinerja pengelolaan zakat nasional serta Indeks Kemiskinan Umum (IKU) dan Indeks Kesejahteraan BAZNAS (IKB) yang digunakan untuk mengukur dampak kinerja pengelolaan zakat terhadap pengentasan kemiskinan di Indonesia selama periode 2021.

C. Hasil dan Pembahasan

1. Pengukuran Kinerja Pengelolaan Zakat Nasional Menggunakan Indeks Zakat Nasional (IZN) 2.0

Indeks Zakat Nasional (IZN) 2.0 merupakan alat ukur yang digunakan untuk menilai dan mengevaluasi kinerja perzakatan nasional yang mencakup peran pemerintah dan masyarakat, kinerja lembaga zakat, serta keberhasilan pengelolaan zakat nasional dalam peningkatan kesejahteraan mustahik dan pengentasan kemiskinan baik ditingkat nasional maupun daerah³⁹. Pengukuran IZN dibentuk dari 2 dimensi yaitu makro mikro. Dimensi makro mendeskripsikan peran dan kontribusi pemerintah serta masyarakat secara agregat dalam pembangunan lembaga pengelola zakat dengan 3 indikator yaitu regulasi, dukungan anggaran pemerintah, dan database lembaga zakat yang terdiri atas jumlah lembaga zakat resmi, muzaki individu, muzaki badan usaha. Dimensi mikro disusun dalam perspektif kelembagaan zakat dan mustahik dengan indikator performa lembaga zakat yang diukur dari aspek pengumpulan, pengelolaan, penyaluran, serta pelaporan dan pertanggungjawaban zakat, serta dampak zakat secara ekonomi, spritual, pendidikan, kesehatan, dan kemandirian^{40, 41}. Nilai IZN 2.0 berkisar dari 0 sd 1 dengan kriteria⁴²

³⁵ Pusat Kajian Strategis BAZNAS. h. 43

³⁶ Al-Arif. h.226

³⁷ Irfan Syauqi Beik. h.68

³⁸ Bappenas. h. 60

³⁹ Strategis. h. 76

⁴⁰ RI, 'Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat'. h.

⁴¹ Strategis. h. 80

⁴² Strategis. h. 90

Tabel 1. Nilai dan Kategori IZN 2.0

No	Nilai	Kategori
1	0,00 - 0,20	Tidak baik
2	0,21 - 0,40	Kurang baik
3	0,41 - 0,60	Cukup baik
4	0,61 - 0,80	Baik
5	0,81 - 1,00	Sangat baik

Sumber : Puskas BAZNAS

2. Kinerja Pengelolaan Zakat Nasional Menggunakan IZN 2.0 Periode 2021

Berdasarkan pengukuran BAZNAS RI terhadap 30 BAZNAS Provinsi dan 297 BAZNAS kab/kota diperoleh nilai IZN untuk periode 2021 sebesar 0,88 dengan kategori sangat baik. Nilai IZN di tahun 2021 mengalami peningkatan bila dibandingkan dengan nilai IZN di periode 2020 yang mendapatkan nilai 0,82 dengan kategori sangat baik⁴³. Angka IZN di periode 2021 didapatkan dari pembobotan dua dimensi pembentuknya yaitu makro dan mikro sebagaimana yang dijelaskan dibawah ini⁴⁴.

Tabel 2. Nilai Indeks Dimensi Makro BAZNAS RI

Variabel	Indeks	Indikator	Indeks	Dimensi
Regulasi Daerah	1,00	Regulasi	1,00	Makro
Dukungan APBN untuk BAZNAS	0,00	Dukungan APBN untuk BAZNAS	0,00	
Jumlah lembaga zakat resmi, muzaki dan mustahik	1,00	Database lembaga zakat	1,00	Mikro
Rasio jumlah muzaki individu terhadap rumah tangga di tingkat nasional	1,00			
Rasio jumlah muzaki badan usaha terhadap jumlah badan usaha di tingkat nasional	1,00			

Sumber : Puskas BAZNAS

Tabel 3. Nilai Indeks Dimensi Mikro BAZNAS RI

Variabel	Indeks	Indikator	Indeks	Dimensi
Pengumpulan	1,00	Kelembagaan	1,00	Mikro
Pengelolaan	1,00			
Penyaluran	1,00			
Pelaporan	1,00			
Indeks Kesejahteraan CIBEST	1,00	Dampak Zakat	0,85	
Modifikasi IPM	0,75			
Kemandirian	0,68			

Sumber : Puskas BAZNAS

Berdasarkan tabel 2. nilai indeks dimensi makro telah masuk ke dalam kategori baik dengan nilai sebesar 0,80. Dari 3 indikator pembentuk dimensi makro terlihat dukungan regulasi dan database lembaga zakat sudah sangat baik dengan nilai 1,00 namun dukungan APBN untuk biaya operasional BAZNAS bernilai tidak baik (0,00). Hal ini perlu menjadi perhatian serius buat pemerintah RI karena pengelolaan zakat

⁴³ Pusat Kajian Strategis BAZNAS.

⁴⁴ Strategis.

tidak akan efektif tanpa dukungan dana operasional yang mencukupi. Tabel 3 menjelaskan nilai indeks dimensi mikro termasuk dalam kategori sangat baik dengan nilai sebesar 0,91 dengan nilai indikator kelembagaan dan dampak yang juga sangat baik yaitu 1,00 dan 0,85. Berdasarkan 2 tabel diatas dapat disimpulkan nilai IZN BAZNAS RI untuk tahun 2021 secara keseluruhan nilai sangat baik (0,88) dengan nilai pembentuk dimensi makro baik (0,80) dan dimensi mikro sangat baik (0,91). Artinya secara keseluruhan kinerja pengelolaan zakat nasional selama periode 2021 adalah sangat baik.

3. Pengukuran Dampak Pengelolaan Zakat Dalam Pengentasan Kemiskinan

Pengukuran dampak pengelolaan zakat nasional terhadap pengentasan kemiskinan diukur berdasarkan pendekatan Indeks Kemiskinan Umum (IKU) dan pendekatan Indeks Kesejahteraan BAZNAS (IKB). Kedua pendekatan diukur dengan standar garis kemiskinan makanan, *had kifayah*, dan nisab zakat. Standar garis kemiskinan berkaitan dengan nilai rupiah pengeluaran minimum guna memenuhi kebutuhan pokok hidup seseorang selama sebulan, baik kebutuhan makanan maupun non-makanan^{45, 46}. IKB nasional berdasarkan standar *had kifayah* berkaitan dengan makanan, pakaian, perumahan, ibadah, pendidikan, kesehatan dan transportasi, dimana ketujuh indikator ini didasarkan pada analisis kebutuhan hidup layak menurut *Maqasid Syari'ah*. Sedangkan berdasarkan nisab zakat didasarkan pada perubahan status mustahik menjadi muzaki⁴⁷.

Nilai IKU diukur berdasarkan 5 indikator yang terdiri atas *Headcount Index* (H) digunakan untuk mengukur banyaknya jumlah penduduk miskin di suatu wilayah. *Income Gap Ratio* (I) untuk mengukur kesenjangan pendapatan, *Sen Index* (P2), dan *Index FGT* (P3) yang sama sama digunakan untuk mengukur tingkat keparahan kemiskinan. Keempat indikator ini dinyatakan dalam rentang nilai 0 sd 1 dimana nilai akan semakin dianggap baik jika semakin mendekati angka nol dan pengelolaan zakat dibidang penyaluran dianggap berdampak baik dalam pengentasan kemiskinan. Sedangkan *Poverty Gap sebagai indikator kelima* berfungsi untuk mengukur tingkat kedalaman kemiskinan dengan satuan rupiah. Semakin mendekati nilai nol rupiah pengelolaan zakat dibidang penyaluran akan berdampak baik terhadap pengentasan kemiskinan⁴⁸.

Nilai IKB diukur menggunakan 3 indikator yaitu 1) Indeks kesejahteraan CIBEST yang digunakan untuk mengukur dampak pengelolaan zakat dibidang penyaluran terhadap pengentasan kemiskinan baik secara materiil, maupun spritual yang dikelompokkan kedalam 4 kuadran yaitu kuadran sejahterah (I), kuadran miskin material kaya spritual (II), kuadran miskin spritual kaya material (III), kuadran absolut, miskin material dan spritual (IV)^{49, 50} 2) Modifikasi IPM berfungsi untuk mengukur kesejahteraan rumahtangga mustahik dilihat dari aspek kesehatan dan pendidikan. 3) indeks kemandirian digunakan untuk mengukur kondisi kemandirian mustahik dalam memiliki pekerjaan tetap, bisnis, dan tabungan. Nilai IKB dapat dijelaskan pada tabel

⁴⁵ Baznas, 'Kajian Had Kifayah', in *Puskasbaznas*, 2018.

⁴⁶ Pusat Kajian Strategis BAZNAS. h. 76

⁴⁷ Pusat Kajian Strategis BAZNAS. h. 76

⁴⁸ Pusat Kajian Strategis BAZNAS. h. 77

⁴⁹ Irfan Syauqi Beik. H. 90

⁵⁰ Strategis. h. 86

dibawah ini dimana nilai IKB yang semakin mendekati 1 maka dapat dikatakan pengelolaan zakat dibidang penyaluran berhasil dalam pengentasan kemiskinan ⁵¹

Tabel 4. Nilai dan Kategori IKB

No	Nilai	Kategori
1	0,00 - 0,20	Tidak baik
2	0,21 - 0,40	Kurang baik
3	0,41 - 0,60	Cukup baik
4	0,61 - 0,80	Baik
5	0,81 - 1,00	Sangat baik

Sumber : Puskas BAZNAS

4. Dampak Pengelolaan Zakat Terhadap Pengentasan Kemiskinan di Indonesia Periode 2021

Berdasarkan hasil pengukuran yang dilakukan terhadap seluruh mustahik dari 34 provinsi di Indonesia dengan total responden sebanyak 9.026 orang menggunakan 2 pendekatan yaitu kemiskinan dan kesejahteraan BAZNAS, dapat dilihat hasil dampak pengelolaan zakat nasional terhadap pengentasan kemiskinan di Indonesia periode 2021⁵².

Tabel 5. Indeks Kemiskinan Umum (IKU)

No	Indikator Kemiskinan	GK	HK	Nisab Zakat
1	H			
	Sebelum	0,79	0,93	0,99
	Sesudah	0,31	0,52	0,87
	Δ	-0,48	-0,41	-0,12
2	I			
	Sebelum	0,50	0,57	0,78
	Sesudah	0,38	0,39	0,57
	Δ	-0,12	-0,18	-0,21
3	P1			
	Sebelum	Rp1.067.325	Rp1.720.398	Rp5.163.444
	Sesudah	Rp808.921	Rp1.182.394	Rp3.778.860
	Δ	-Rp258.404	-Rp538.004	-Rp1.384.584
4	P2			
	Sebelum	0,55	0,68	0,86
	Sesudah	0,19	0,32	0,64
	Δ	-0,36	-0,36	-0,22
5	P3			
	Sebelum	0,26	0,37	0,63
	Sesudah	0,07	0,12	0,33
	Δ	-0,20	-0,25	-0,30

Sumber : Puskas BAZNAS

Hasil penghitungan IKU mustahik secara nasional sebelum dan sesudah mendapatkan bantuan zakat menggunakan *Headcount Index* (H), *Income Gap Ratio*, *Sen Index* dan *Index FGT* mengalami penurunan sesudah mendapatkan bantuan zakat pada seluruh standar penghitungan GK, HK, dan nisab zakat dimana nilainya semakin mendekati nol sehingga dapat diartikan pengelolaan zakat dibidang penyaluran dapat dianggap memberikan dampak yang baik terhadap pengentasan kemiskinan.

⁵¹ Strategis.

⁵² Strategis.

Tabel 6. Indeks Kesejahteraan BAZNAS (IKB)

No	Keterangan	CIBEST	Modifikasi IPM	Kemandirian	Total Nilai IKB	Indikator
1.	Garis Kemiskinan	0,75	0,50	0,47	0,62	Baik
2.	<i>Had Kifayah</i>	0,50	0,50	0,47	0,49	Cukup Baik
3.	nisab zakat	0,00	0,50	0,47	0,24	Kurang Baik

Sumber : Puskas BAZNAS

Nilai IKB, berdasarkan indikator garis kemiskinan memberikan dampak yang dirasakan sudah baik (0,62) meskipun jika dilihat dari standar *had kifayah* dan nisab zakat, dampak yang diberikan masih pada kategori cukup baik (0,49) dan kurang baik (0,24), namun tidak menjadi persoalan karena standar *had kifayah* dan standar nisab zakat lebih tinggi bila dibandingkan dengan standar garis kemiskinan. Jadi, secara keseluruhan berdasarkan indikator IKU dan IKB dapat dikatakan bahwa pengelolaan zakat nasional dibidang penyaluran telah memberikan dampak yang baik terhadap kesejahteraan mustahik dan pengentasan kemiskinan di Indonesia periode 2021.

Penjelasan nilai IKB nasional berdasarkan indikator Indeks kesejahteraan CIBEST, modifikasi IPM dan indeks kemandirian dapat dilihat pada tabel dibawah ini :

Tabel 7 Indeks Kesejahteraan BAZNAS (IKB) berdasarkan garis kemiskinan

Indeks Kesejahteraan CIBEST		0,75
Kuadran*	Kuadran I	68,31%
	Kuadran II	31,21%
	Kuadran III	0,23%
	Kuadran IV	0,24%
Indeks Modifikasi IPM		0,50
Indeks Penyusun	Indeks Kesehatan	0,59
	Indeks Pendidikan	0,61
Indeks Kemandirian		0,47
Variabel*	Pendapatan Rutin	71,19%
	Pendapatan Tidak Rutin	27,12%
	Aset Disewakan	0,77%
	Tabungan	53,58%
INDEKS KESEJAHTERAAN BAZNAS		0,62

Sumber : Puskas BAZNAS

Nilai IKB nasional dengan indikator garis kemiskinan periode 2021 termasuk kategori baik (0,62). Untuk indikator indeks kesejahteraan CIBEST mendapatkan nilai 0,75 (baik) dengan 68,31% rumah tangga mustahik tergolong kaya material dan spritual, 31,21% mustahik dalam kondisi miskin material namun kaya spritual, 0,23% berada dalam kondisi miskin spritual namun kaya material, dan 0,24% mengalami miskin absolut atau miskin material dan spritual. Nilai indeks IKB nasional berdasarkan indikator modifikasi IPM termasuk kedalam kategori cukup baik (0,50) dengan nilai indeks kesehatan cukup baik (0,59) dan indeks pendidikan sebesar 0,61 dengan kategori baik. Nilai indeks kemandirian secara nasional adalah sebesar 0,47 dengan kategori cukup baik, dimana sebesar 71,19% mustahik telah memiliki pendapatan rutin, 27,12% mustahik telah memiliki pendapatan tidak rutin, 0,77% mustahik mempunyai aset dan telah disewakan sebagai salah satu sumber pendapatan, dan sebesar 53,58% mustahik telah melakukan aktivitas menabung.

Tabel 8. Indeks Kesejahteraan BAZNAS (IKB) berdasarkan had kifayah

Indeks Kesejahteraan CIBEST		0,50
Kuadran*	Kuadran I	48,06%
	Kuadran II	51,46%
	Kuadran III	0,19%
	Kuadran IV	0,29%
Indeks Modifikasi IPM		0,50
Indeks Penyusun	Indeks Kesehatan	0,59
	Indeks Pendidikan	0,61
Indeks Kemandirian		0,47
Variabel*	Pendapatan Rutin	71,19%
	Pendapatan Tidak Rutin	27,12%
	Aset Disewakan	0,77%
	Tabungan	53,58%
INDEKS KESEJAHTERAAN BAZNAS		0,49

Sumber : Puskas BAZNAS

Nilai IKB yang dihitung berdasarkan *had kifayah* termasuk ke dalam kategori cukup baik dengan nilai 0,49. Nilai indeks kesejahteraan CIBEST adalah sebesar 0,50 yang termasuk ke dalam kategori cukup baik. Hal ini terjadi karena adanya penurunan jumlah mustahik yang berada pada kuadran sejahterah dan berpindah pada kuadran kedua (miskin material namun kaya spritual) yang menyebabkan terjadinya kenaikan jumlah mustahik pada kuadran ini. Untuk hasil pengukuran indeks modifikasi IPM dan kemandirian mendapatkan nilai yang sama dengan standar garis kemiskinan, sehingga dapat disimpulkan penggunaan standar yang berbeda tidak mempengaruhi nilai kedua indeks tersebut.

Tabel 9. Indeks Kesejahteraan BAZNAS (IKB) Berdasarkan Nisab Zakat

Indeks Kesejahteraan CIBEST		0,00
Kuadran*	Kuadran I	13,08%
	Kuadran II	86,44%
	Kuadran III	0,01%
	Kuadran IV	0,47%
Indeks Modifikasi IPM		0,50
Indeks Penyusun	Indeks Kesehatan	0,59
	Indeks Pendidikan	0,61
Indeks Kemandirian		0,47
Variabel*	Pendapatan Rutin	71,19%
	Pendapatan Tidak Rutin	27,12%
	Aset Disewakan	0,77%
	Tabungan	53,58%
INDEKS KESEJAHTERAAN BAZNAS		0,24

Sumber : Puskas BAZNAS

Nilai IKB berdasarkan nisab zakat termasuk kategori kurang baik dengan nilai 0,24. Nilai indeks kesejahteraan CIBEST sama sekali tidak ada atau 0,00% dengan kategori tidak baik. Peningkatan yang signifikan terjadi pada kuadran II yaitu menjadi 86,44% mustahik berada dalam kondisi miskin material yang diduga bertambah karena adanya penurunan pada jumlah mustahik di kuadran I (sejahterah). Sementara itu, pada indeks modifikasi IPM dan indeks kemandirian memiliki nilai yang sama dengan nilai pada standar garis kemiskinan. Oleh karena itu, penghitungan dengan menggunakan standar

berbeda hanya mempengaruhi indeks CIBEST tetapi tidak mempengaruhi dua indeks penyusun IKB lainnya.

D. Simpulan

Kinerja pengelolaan zakat nasional untuk periode 2021 dinilai sangat baik dengan nilai Indeks Zakat Nasional (IZN) sebesar 0,88 yang terbentuk dari nilai dimensi makro sebesar 0,8 atau sangat baik dan nilai dimensi mikro sebesar 0,91 atau sangat baik, dan secara keseluruhan berdasarkan indikator IKU dan IKB dapat dikatakan bahwa pengelolaan zakat nasional dibidang penyaluran telah dapat meningkatkan kesejahteraan mustahik dan pengentasan kemiskinan di Indonesia periode 2021.

Keberhasilan pengelolaan zakat nasional berdampak positif terhadap keberhasilan pemerintah memperbaiki kesejahteraan masyarakat miskin dalam pemenuhan kebutuhan dasar makanan dan non makanan (pakaian, tempat tinggal, pendidikan, kesehatan, sarana transportasi), dan dengan semakin membaiknya kesejahteraan masyarakat akan berdampak positif terhadap keberhasilan pengentasan kemiskinan.

Daftar Pustaka

- Adhitya, Bagus, Agus Prabawa, and Heris Kencana, 'Analisis Pengaruh Pendidikan , Kesehatan , Sanitasi Dan Rata-Rata Jumlah Anggota Keluarga Per Rumah Tangga Terhadap Kemiskinan Di Indonesia', 6.1 (2022), 288–95 <<https://doi.org/10.33087/ekonomis.v6i1.501>>
- Al-Arif, M. Nur Rianto, *Teori Makroekonomi Islam: Konsep, Teori, Dan Analisis*, satu (Bandung: alfabeta, 2010)
- Anggraeni, Rachvianti Putri, Jurusan Ekonomi Pembangunan, Fakultas Ekonomi, and Universitas Tidar, 'Pengentasan Angka Kemiskinan Di Indonesia Tahun 2015-2019', 2.4 (2022), 1–12
- Azizah, Siti Nur, Rofika Febriani, Universitas Islam, Negeri Sunan, and Ampel Surabaya, 'Implementasi Zakat Sebagai Islamic Social Security Menurut Pandangan Muhammad Nejatullah Siddiqi', 07.01 (2022)
- Bappenas, *Visi Dan Arah Pembangunan Jangka Panjang (PJP) TAHUN 2005 – 2025*, 2005
- Barat, Pemerintah Provinsi Sumatera, *Rencana Strategis (RENSTRA) 2021-2026, Badan Perencanaan Pembangunan Nasional*, 2021
- Baznas, 'Kajian Had Kifayah', in *Puskasbaznas*, 2018
- Departemen Ekonomi dan Keuangan Syariah - Bank Indonesia, and P3EI Fakultas Ekonomi - Universitas Islam Indonesia, *Pengelolaan Zakat Yang Efektif: Konsep Dan Praktik Di Berbagai Negara*, Edisi Pert (Jakarta: Departemen Ekonomi dan Keuangan Syariah - Bank Indonesia, 2016)
- Enia elga pratiwi, 'Analisis Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi, Tingkat Pendidikan Dan Kesehatan Terhadap Jumlah Penduduk Miskin Di Bali Tahun 2011-2020', 6.1 (2022), 112–22
- Gopal, Parthiban S, Muhammad Alnaufal, Abdul Rahman, Nor Malina Malek, and Paramjit Singh, 'Kemiskinan Adalah Satu Fenomena Multidimensi : Suatu Pemerhatian Awal Abstrak Poverty Is a Multidimensional Phenomenon : A Preliminary Observation Abstract Pengenalan', 6.1 (2021), 40–51
- Irfan Syauqi Beik, Laili Dwi Arsyianti, *Ekonomi Pembangunan Syariah*, revisi (jakarta:

- PT. Rajagrafindo, 2016)
- Komunikasi, Kementerian, and D A N Informatika, *Program Penanggulangan Kemiskinan*, 2011
- Nasution, Adanan Murrah, 'Pengelolaan Zakat Di Indonesia', 1 (2020), 293–305
- Nurul Huda, Handi Risza Idris, Mustafa Edwin Nasution, Ratih Wiliasih, *Ekonomi Makro Islam* (Jakarta: Kecana Prenada Media Group, 2015)
- Nurul Huda, *Ekonomi Pembangunan Islam*, Pertama (Jakarta: Kecana Prenada Media Group, 2015)
- Pusat Kajian Strategis BAZNAS, *Indeks Zakat Nasional Dan Kaji Dampak Zakat 34 Provinsi 2021, Jilid 1, Puskabaznas* (Jakarta: Puskas BAZNAS, 2022)
- Rahmad Hakim, *Manajemen Zakat: Histori, Konsepsi, Implementasi*, (Jakarta: Kecana Prenada Media Group, 2020)
- RI, Undang-Undang, 'Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2007 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005 -2025', 2007, pp. 1–13
- , 'Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat', 2011
- Straatmann, Viviane S, Gabriella Melis, Kate M Fleming, Ruth Mcgovern, Nicholas Ko, and K Schl, 'Articles Impact of Poverty and Family Adversity on Adolescent Health: A Multi-Trajectory Analysis Using the UK Millennium Cohort Study', 13 (2022) <<https://doi.org/10.1016/j.lanpe.2021.100279>>
- Strategis, Pusat Kajian, 'Hasil Pengukuran Implementasi Indeks Zakat Nasional 2020', 2021
- Suryo Sakti Hadiwijoyo, Fahimah Diah Anisa, *Perencanaan Pembangunan Daerah* (Jakarta: PT. Rajagrafindo, 2020)
- Umer.M.Chapra, *Islam and the Economic Challenge* (Riyadh: The Islamic Foundation dan The International Institute of Islamic Thought, 1992)
- Yusuf Qardhawi, 'Kiat Islam Mengentaskan Kemiskinan', (Jakarta: Gema Insani Press, 1995)